

RAHASIA



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Dewi Sartika No. 47 Palu Telp. (0451) 488152 - 488034

LAPORAN HASIL EVALUASI
PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
BIRO ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR : 700.1.2.1/131/LHE-PMPRB/PROV/IRBAN3/2024
TANGGAL : 11 JULI 2024

RAHASIA



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Dewi Sartika No. 47 Palu Telp. (0451) 488152 - 488034

**LAPORAN HASIL EVALUASI
PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
BIRO ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

NOMOR : 700.1.2.1/131/LHE-PMPRB/PROV/IRBAN3/2024

TANGGAL : 11 JULI 2024



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

INSPEKTORAT DAERAH

JALAN DEWI SARTIKA NO. 47 TELP. (0451) 488152-488034

Nomor : 700.1.2.1/131/LHE-PMPRB/PROV/IRBAN3/2024 Palu, Juli 2024
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Laporan Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.

Yth. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah
di-
P A L U

Sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan Pelaksanaan Roadmap Reformasi Birokrasi Provinsi Sulawesi Tengah, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip *Total Quality Management* dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja Instansi Pemerintah.

Disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 hanya terfokus terhadap 2 (dua) Komponen besar
 - a. **Pengungkit**
 - b. **Hasil**
- 2) Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023, sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah secara manajerial kepada Gubernur. dengan tujuan :
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Reformasi Birokrasi
 - b. Menilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (*reform* dan hasil).
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk Peningkatan Reformasi Birokrasi.
- 3) Evaluasi Komponen Pengungkit dibagi menjadi 8 (delapan) bagian area

perubahan Reformasi Birokrasi yaitu **Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Organisasi, Tatalaksana, Sumber Daya Manusia Aparatur, Akuntabilitas, Pengawasan, dan Pelayanan publik.**

- 4) Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran dari **0 (nol)** sampai dengan **100 (seratus).**

Kategori	Nilai/ Angka	Predikat	Interpretasi
AA	>90- 100	Istimewa	Memenuhi kriteria sebagai organisasi berbasis kinerja yang mampu mewujudkan seluruh sasaran Reformasi Birokrasi.
A	>80- 90	Sangat Baik	Memenuhi karakteristik organisasi berbasis kinerja namun belum mampu mewujudkan keseluruhan sasaran Reformasi Birokrasi baik secara
BB	>70- 80	Baik	Secara instansional mampu mewujudkan sebagian besar sasaran Reformasi Birokrasi, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja hanya sebagian kecil
B	>60-70	Cukup Baik	Penerapan Reformasi Birokrasi bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi.
CC	>50- 60	Cukup	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal terbatas di tingkat instansi dan belum berjalan secara merata di seluruh
C	>30-50	Buruk	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal ditingkat instansi dan hanya mencakup sebagian kecil unit kerja.
D	0-30	Sangat Buruk	Memiliki inisiatif awal menerapkan Reformasi Birokrasi dan perbaikan kinerja instansi belum terwujud.

- 5) Hasil Evaluasi pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terhadap 2 (Dua) unsur komponen pengungkit reformasi birokrasi sebagai hasil, mendapatkan nilai skor **84,83** sehingga masuk dalam kategori **A (>80-90 Sangat Baik)** dengan interpretasi **“Penerapan Reformasi Birokrasi bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja Organisasi.”**
- 6) Nilai sebagaimana tersebut dalam poin 5 (lima), merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh area perubahan Reformasi Birokrasi yang dievaluasi pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023. Dengan Uraian Sebagai Berikut :

A. KOMPONEN PENGUNGKIT

I. Pemenuhan (20)

Berdasarkan penilaian terhadap komponen memperoleh nilai **44,83** dari bobot nilai **60,00** yang merupakan hasil penilaian terhadap Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Suulawesi Tengah Memperoleh Nilai **16,20** Dari bobot nilai **20,00** Yang merupakan hasil penilaian sub komponen manajemen dan penguatan tatalaksana, penataan system manajemen SDM penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan-pengawasan, penguatan kualitas pelayanan puublik dengan rincian sebagai berikut :

- i. Manajemen Perubahan (2,00); dari total capaian penilaian komponen Manajemen Perubahan memberikan kontribusi nilai sebesar **2,00** dari bobot sub komponen sebesar 2,00 yang terdiri atas penilian sub-sub komponen sebagai berikut :
 - a. **Tim Reformasi Birokrasi** memberikan kontribusi nilai **0,40** dari bobot nilai **0,40** dikarenakan telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja.
 - b. **Road Map Reformasi Birokrasi** memberikan kontribusi nilai **0,40** dari bobot nilai **0,40** dikarenakan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi telah disusun dan telah disosialisasikan kepada anggota organisasi.
 - c. **Pemantauan dan Evaluasi Reformasi dan Birokrasi** memberikan nilai **0,47** dari bobot nilai **0,80** dikarenakan belum terdapat rencana aksi tindak lanjut dan telah di monitoring dan di evaluasi.
 - d. **Perubahan Pola Pikir dan Budaya** memberikan kontribusi nilai **0,33** dari bobot nilai **0,40** karena Pimpinan unit kerja terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam sebagian pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sudah terdapat upaya pembentukan Agent of Change dan role model,
- ii. Deregulasi memberikan kontribusi nilai sebesar **2,00** dari bobot sub komponen sebesar **2,00** yang terdiri atas penilaian sub-sub komponen sebagai berikut:
 - a. **Harmonisasi** memberikan nilai sebesar **2,00** dari bobot nilai **2,00** kondisi ini di latar belakang unit kerja telah melakukan

identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh kebijakan yang tidak harmonis, tidak sinkron dan bersifat menghambat namun upaya merevisi kebijakan yang tidak harmonis, tidak sinkron dan bersifat menghambat belum selesai.

- iii. Penataan dan Penguatan Organisasi (**3,00**), dari total penilaian komponen penataan dan penguatan organisasi memberikan kontribusi nilai sebesar **3,00** dari bobot sub komponen sebesar **3,00** yang terdiri atas penilaian sub-sub komponen sebagai berikut:
 - a. **Evaluasi Kelembagaan** memberikan nilai **2,00** dari bobot nilai sebesar **2,00** kondisi ini karena telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan dan telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi serta telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.
 - b. **Tindak Lanjut Evaluasi** memberikan nilai **0,67** dari bobot nilai **1,00** karena sebagian besar hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi.
- iv. Penataan Tatalaksana (**2,50**) dari total penilaian komponen penataan tatalaksana memberikan kontribusi nilai sebesar **2,50** dari bobot sub komponen sebesar 2,50 yang terdiri atas penilaian sub-sub komponen sebagai berikut:
 - a. **Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP)** memberikan nilai **0,72** dari bobot nilai sebesar **1,25** kondisi ini karena unit kerja telah menyusun peta proses bisnis yang sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis dan sebagian besar prosedur operasional (SOP) telah diterapkan.
 - b. **Keterbukaan Informasi Publik** memberikan nilai **0,94** dari bobot nilai sebesar **1,25** kondisi ini karena telah ada kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi public dan monitoring evaluasi telah dilakukan namun tidak secara berkala.
- v. Penataan Sistem Manajemen SDM (**3,00**) dari total penilaian komponen penataan system manajemen SDM

memberikan kontribusi nilai sebesar **2,33** dari bobot sub komponen sebesar 3,00 yang terdiri atas penilaian sub-sub komponen sebagai berikut:

- a. **Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi** memberikan nilai sebesar **0,50** dari bobot nilai **0,50** karena Perhitungan, analisa dan hasil kinerja kebutuhan pegawai telah dilakukan.
 - b. **Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi** memberikan nilai sebesar **0,34** dari bobot nilai sebesar **0,50** dikarenakan unit kerja telah melakukan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada **Sebagian Besar** pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi.
 - c. **Penetapan Kinerja Individu** memberikan nilai **0,36** dari bobot nilai sebesar **0,50** Hal ini disebabkan Telah dilakukan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap sebagian pegawai.
 - d. **Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai** memberikan nilai sebesar **0,29** dari nilai bobot sebesar **0,50** karena sebagian besar aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan namun Monev atas Pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku tidak secara berkala.
 - e. **Pelaksanaan Evaluasi Jabatan** memberikan nilai **0,36** dari bobot nilai sebesar **0,50** karena Unit kerja hanya mengimplementasikan Standar Kompetensi Jabatan pada seluruh jabatan dan Evaluasi jabatan hanya dilaksanakan pada sebagian jabatan berdasarkan SKJ.
 - f. **Sistem Informasi Kepegawaian** memberikan nilai **0,50** dari bobot nilai sebesar **0,50** dikarenakan sistem informasi kepegawaian dapat di akses oleh pegawai.
- vi. Penguatan Akuntabilitas (**2,50**) dari total penilaian komponen penguatan akuntabilitas memberikan kontribusi nilai sebesar **2,50** dari bobot sub komponen sebesar 2,50 yang terdiri atas penilaian sub-sub komponen sebagai berikut:
- a. **Keterlibatan Pimpinan** memberikan nilai sebesar **1,25** dari bobot nilai sebesar **1,25** karena Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada seluruh penyusunan Renstra, dan selanjutnya.
 - b. **Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja** memberikan nilai **1,25** dari bobot nilai sebesar **1,25** dikarenakan unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas seluruh SDM yang menangani akuntabilitas kinerja dan pemutakhiran data kinerja dilakukan secara triwulanan.

- vii. Penguatan Pengawasan (**1,82**) dari total penilaian komponen penguatan pengawasan memberikan kontribusi nilai sebesar **2,50** dari bobot sub komponen sebesar 2,50 yang terdiri atas penilaian sub-sub komponen sebagai berikut:
- a. **Gratifikasi** memberikan nilai **0,50** dari bobot nilai sebesar **0,50** karena karena public company telah dilakukan secara berkala.
 - b. **Penerapan SPIP** memberikan nilai **0,40** dari bobot nilai **0,37** karena unit kerja telah Menerapkan SPIP.
 - c. **Pengaduan Masyarakat** memberikan nilai **0,40** dari bobot nilai sebesar **0,23** karena Penanganan pengaduan masyarakat belum di monitoring dan evaluasi.
 - d. **Whistle Blowing System** memberikan nilai **0,27** dari bobot nilai sebesar **0,40** dikarenakan Whistle blowing system hanya disosialisasikan ke Sebagian besar pegawai.
 - e. **Penanganan Benturan Kepentingan** memberikan nilai sebesar **0,18** dari bobot nilai sebesar **0,40** disebabkan penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan ke sebagian pegawai, namun belum di monitoring dan di evaluasi secara berkala.
 - f. **Pembangunan Zona Integritas** memberikan nilai **0,27** dari bobot nilai sebesar **0,40** disebabkan Belum dilakukan pencanaan Pembangunan zona integritas level unit kerja.
- viii. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (2,50) dari total capaian penilaian komponen Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik memberikan kontribusi nilai sebesar **2,50** dari bobot sub komponen sebesar **2,08** yang terdiri atas penilaian sub-sub komponen sebagai berikut:
1. **Standar Pelayanan** memberikan nilai **0,35** dari bobot nilai sebesar **0,50** disebabkan unit kerja menetapkan Standar Pelayanan hanya terhadap Sebagian besar jenis pelayanan dan telah dipublikasikan serta saat Reviu dilakukan dengan memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat, namun tanpa melibatkan stakeholders.
 2. **Budaya Pelayanan Prima** memberikan nilai **0,34** dari bobot nilai sebesar **0,50** disebabkan unit kerja telah melakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, sehingga seluruh petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan namun belum ada inovasi pelayanan.

3. **Pengelolaan Pengaduan** memberikan nilai **0,32** dari bobot nilai sebesar **0,50** disebabkan telah terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, serta telah ada petugas khusus yang menangani dan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan namun konsultasi dilakukan tidak berkala.
4. **Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan** memberikan nilai **0,32** dari bobot nilai sebesar **0,50** disebabkan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan telah dilakukan 4 kali setahun dan dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survei kepuasan masyarakat.
5. **Pemanfaatan Teknologi Informasi** memberikan nilai **0,29** dari bobot nilai sebesar **0,50** disebabkan Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada sebagian kecil proses pemberian layanan dan Perbaikan dilakukan tidak secara terus menerus.

II. Aspek Reform (40)

Komponen Pengungkit dari aspek Reform memberikan kontribusi nilai sebesar **40,00** dan bobot penilaian **28,63** yang dapat dirinci dalam penilaian 8 sub komponen sebagai berikut:

- i. Manajemen Perubahan (4,00); dari total capaian penilaian komponen Manajemen Perubahan memberikan kontribusi nilai sebesar **4,00** dari bobot sub komponen sebesar 4,00 yang terdiri atas penilaian sub-sub komponen sebagai berikut :
 - a. **Komitmen dalam Perubahan** memberikan nilai **1,30** dari bobot nilai sebesar **1,30** karena unit kerja sudah membentuk agen perubahan, sehingga telah terdapat Perubahan/inovasi yang dibuat dan diintegrasikan dalam sistem manajemen untuk dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas/pelayanan.
 - b. **Komitmen Pimpinan** memberikan nilai **1,30** dari bobot nilai sebesar **1,30** karena Target capaian reformasi sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja dan sebagian besar (diatas 80%) sudah tercapai.
 - c. **Membangun Budaya Kerja** memberikan nilai **1,30** dari bobot nilai sebesar **1,30** karena Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah disusun, dan sudah dinternalisasi ke seluruh anggota organisasi.

- ii. Deregulasi Kebijakan (4,00); dari total capaian penilaian komponen deregulasi memberikan kontribusi nilai sebesar **4,00** dari bobot sub komponen sebesar **4,00** yang terdiri atas penilaian sub-sub komponen sebagai berikut:
 - a. **Peran Kebijakan** memberikan nilai sebesar **2,00** dari bobot nilai sebesar **4,00** disebabkan Unit Kerja Telah memiliki sebagian kebijakan yang terbit, telah memenuhi peta keterkaitan dengan kejadian lainnya.
- iii. Penataan dan Penguatan Organisasi (6,50); dari total penilaian komponen penataan dan penguatan organisasi memberikan kontribusi nilai sebesar **6,50** dari bobot sub komponen sebesar 6,50 yang terdiri atas penilaian sub-sub komponen sebagai berikut:

“ **Organisasi Berbasis Kinerja**” memberikan nilai **6,50** dari bobot nilai sebesar **6,50** disebabkan unit kerja telah mengusulkan penyesuaian organisasi dalam rangka mewujudkan organisasi yang efektif, efisien dan tepat ukuran sesuai proses bisnis, dengan mempertimbangkan kinerja utama yang dihasilkan.
- iv. Penataan Tatalaksana (**4,36**); dari total penilaian komponen penataan tatalaksana memberikan kontribusi nilai sebesar **4,75** dari bobot sub komponen sebesar 4,75 yang terdiri atas penilaian sub-sub komponen sebagai berikut:
 - a. **Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan** memberikan nilai **1,50** dari bobot nilai sebesar **1,50** Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi penyederhanaan sebagian besar (lebih dari 50%) jabatan.
 - b. **Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)** memberikan nilai **1,59** dari bobot nilai **1,59** disebabkan Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan public yang lebih efisien & efektif.
 - c. **Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat** memberikan nilai **1,19** dari bobot nilai sebesar **1,58** disebabkan transformasi digital pada bidang proses bisnis utama dan bidang administrasi pemerintahan telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal serta bidang pelayanan publik telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal.

- v. Penataan Sistem Manajemen SDM (**6,50**); dari total penilaian komponen penataan system manajemen SDM memberikan kontribusi nilai sebesar **6,50** dari bobot sub komponen sebesar 4,30 yang terdiri atas penilaian sub-sub komponen sbb:
- a. **Kinerja Individu** memberikan nilai **1,10** dari bobot nilai sebesar **2,20** disebabkan seluruh ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya.
 - b. **Assessment Pegawai** memberikan nilai **2,10** dari bobot nilai sebesar **2,10** disebabkan Hasil assessment belum seluruhnya dijadikan mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai.
 - c. **Pelanggaran Disiplin Pegawai** memberikan nilai **2,10** dari bobot nilai sebesar **2,10** disebabkan pada Unit Kerja Belum pernah terjadi pelanggaran Disiplin Pegawai.
- vi. Penguatan Akuntabilitas (**4,75**); dari total penilaian komponen penguatan akuntabilitas memberikan kontribusi nilai sebesar **4,75** dari bobot sub komponen sebesar 3,71 yang terdiri atas penilaian sub-sub komponen sebagai berikut:
- a. **Efektifitas dan Efisiensi Anggaran** memberikan nilai **0,54** dari bobot nilai sebesar **0,19** disebabkan Tidak ada Anggaran yang berhasil difocussing untuk mendukung tercapainya kinerja utama organisasi.
 - b. **Pemanfaatan Aplikasi Akuntabilitas Kinerja** memberikan nilai **1,19** dari bobot nilai **1,19** karena aplikasi yang terintegrasi telah dimanfaatkan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran.
 - c. **Pemberian Reward and Punishment** memberikan nilai **1,19** dari bobot nilai sebesar **1,19** seluruh capaian kinerja merupakan unsur dalam pemberian reward & punishment
 - d. **Kerangka Logis Kinerja** memberikan nilai **0,79** dari bobot sebesar **1,18** disebabkan peta strategis (kerangka logis) ada dan mengacu pada kinerja utama organisasi dan digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai.
- vii. Penguatan Pengawasan (**4,75%**); dari total penilaian komponen penguatan pengawasan memberikan kontribusi nilai sebesar **1,59** dari bobot sub komponen sebesar 4,75

yang terdiri atas penilaian sub-sub komponen sebagai berikut:

- a. **Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)** memberikan nilai **1,59** dari bobot nilai sebesar **1,59** disebabkan persentase penyampaian LHKPN telah tercapai.
- b. **Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)** memberikan nilai **1,58** dari bobot nilai sebesar **0,00** disebabkan persentase penyampaian LHKASN tidak tercapai.
- c. **Penanganan Pengaduan Masyarakat** memberikan nilai **0,00** dari bobot nilai sebesar **1,50** disebabkan Tidak terdapat penanganan pengaduan masyarakat pada unit kerja.

viii. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (4,75); dari total capaian penilaian komponen Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik memberikan kontribusi nilai sebesar **3,18** dari bobot sub komponen sebesar **4,75** yang terdiri atas penilaian sub-sub komponen sebagai berikut :

- a. **Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik** memberikan nilai **1,59** dari bobot nilai sebesar **2,38** disebabkan Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan telah mendorong perbaikan seluruh pelayanan puublik yang prima.
- b. **Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi** memberikan nilai **1,59** dari bobot nilai **2,38** karena Pengaduan pelayanan dan konsultasi direspon telah direspon dengan cepat melalui berbagai media.

B. KOMPONEN HASIL (40)

Berdasarkan penilaian terhadap komponen hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memperoleh nilai **40,00** dari bobot nilai sebesar **40,00** yang merupakan hasil penilaian akuntabilitas kinerja dan keuangan dengan rincian nilai sebagai berikut :

a. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Akuntabilitas kinerja dan keuangan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memberikan nilai sebesar **40,00** dari

nilai bobot sebesar **40,00** dikarenakan persentase realisasi tindak lanjut temuan inspektorat dan badan pemeriksa keuangan dibawah 80 %.

Saran/Rekomendasi

Dari hasil evaluasi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, disarankan kepada kepala Biro agar memerintahkan jajarannya untuk melakukan perbaikan terhadap:

A. Komponen Pengungkit

1. Pimpinan Unit Kerja Segera membentuk Tim untuk penanganan Gratifikasi.
2. Mensosialisasikan Whistle blowing system dan Penanganan Benturan Kepentingan kepada seluruh Pegawai pada unit kerja.
3. Segera mengusulkan penancangan pembangunan Zona Integritas Level unit kerja.
4. Mensosialisasikan penerapan pelayanan prima secara optimal dan berkala.
5. Membangun inovasi pelayanan prima yang diakui secara nasional.
6. Segera Membentuk Agen Perubahan pada unit kerja.
7. Segera membuat peta Kebijakan yang diterbitkan dan saling keterkaitan dengan kebijakan lainnya.
8. Mensosialisasikan Penerapan Aturan disiplin/Kode etik/kode perilaku instansi agar ditetapkan.

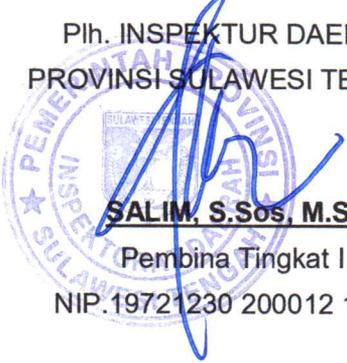
B. Komponen Hasil

- a. Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.
- b. Melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik berdasarkan hasil indeks kepuasan masyarakat.

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari semua pejabat dan pegawai Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga dapat mendukung terlaksananya evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023 sesuai dengan data yang diperoleh,

selanjutnya saran perbaikan diharapkan dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dan atas perhatiannya tim evaluasi mengucapkan terima kasih.

Plh. INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH


SALIM, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP.19721230 200012 1 004

Tembusan Yth :

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu (sebagai laporan).
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.